

**DETERMINAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN****Herlaini Novia Sari¹, Siska Aprianti², Sri Hartaty³**^{1,3}Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, ²Politeknik Negeri SriwijayaEmail: noviasariherlaini@gmail.com¹, siskaaprianti@polsri.ac.id², srihartati@polsri.ac.id³**Abstrak**

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan dalam mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada pemerintah kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian yang dijalankan ialah penelitian kuantitatif, memakai data sekunder dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumen yang bersumber dari LHP atas LKPD Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan memakai metode sampling jenuh dan menggunakan Populasi yaitu 17 Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun anggaran dari tahun 2018-2022, dengan total sampel sebanyak 85 unit pengamatan. Penelitian yang dilaksanakan memakai metode analisis regresi data panel memakai aplikasi Eviews 12. Hasil uji pada uji F memperlihatkan jika ukuran pemerintah, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan belanja modal secara simultan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada kelemahan sistem pengendalian internal. Sedangkan secara parsial ukuran pemerintah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan, belanja modal mempunyai pengaruh yang negatif signifikan, sementara itu variabel pendapatan asli daerah tidak memberikan pengaruh pada kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal.

Abstract

Abstract This study aims to determine the effect of government size, special allocation funds, regional original income, and capital expenditures on the weakness of the internal control system in district and city governments in South Sumatra Province. The type of research used in this study is quantitative research, using secondary data and document data collection techniques sourced from LHP in LKPD Regency or City in South Sumatra Province. This study used a saturated sampling method with a population of 17 district and city governments in South Sumatra Province for 5 fiscal years from 2018 to 2022, with a total sample of 85 observation units. This study uses the panel data regression analysis method using the Eviews 12 application. The results of the F test show that government size, special allocation funds, local revenue, and capital expenditure simultaneously have a positive and significant effect on internal control system weaknesses. While partially the size of the government and special allocation funds have a significant positive effect, capital expenditure has a significant negative effect, and the local revenue variable has no effect on the weakness of the internal control system.

Keywords: Government Size, Special Allocation Fund, Local Own Revenue, Capital Expenditure, And Weaknesses Of The Internal Control System.

A. PENDAHULUAN

Berlandaskan UU No. 1 Th. 2004 pasa 56 ayat 4 mengenai Perbendaharaan Negara, disebutkan jika pengelolaan keuangan daerah wajib terdapat dukungan oleh sistem pengendalian yang memadai dan pengendalian secara baik. PP Nomor 60 Th. 2008 menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan memakai kerangka *Committee off Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions* (COSO). Sistem pengendalian ialah sebuah proses aktivitas ataupun tindakan yang dilangsungkan dengan konsisten oleh pimpinan serta semua karyawan yang digunakan dalam memberi rasa yakin yang baik jika tujuan sebuah organisasi diraih lewat aktivitas yang efisien serta efektif, perlindungan aset negara, pelaporan keuangan yang akurat serta taat pada setiap aturan perundangan.

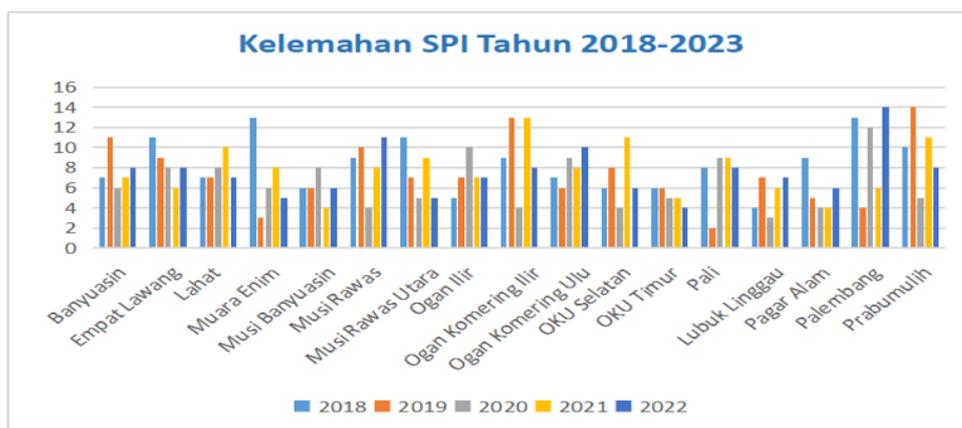
Pada Pernyataan Nomor 3, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menetapkan jika LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan yang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan wajib mencakup pelaporan mengenai pengendalian internal yang berkaitan dengan kekurangan pada penerapan pengendalian internal dari laporan keuangan, dimana dirasa menjadi "keadaan yang bisa dilaporkan". Selain itu, wajib diberitahu dengan tertulis terhadap entitas yang diperiksa. Laporan Hasil Pemeriksaan membantu menyajikan apa saja yang sudah dilakukan pemeriksaan dalam bentuk hasil pemeriksaan terhadap pihak yang mempunyai kewenangan, mencegah terjadinya miskomunikasi, membantu lembaga terkait melakukan revisi, dan memudahkan pemantauan tindak lanjut.

Untuk mencegah kecurangan dalam suatu organisasi, pengendalian absolut diperlukan. *Fraud* dalam organisasi, baik yang berorientasi keuntungan maupun nonprofit, umumnya terjadi karena lemahnya SPI organisasi. Sistem pengendalian intern yang mempunyai kelemahan tersebut dapat menyebabkan peluang untuk sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab akan mereak manfaatkan demi melancarkan kecurangan yang bertujuan untuk kepentingannya secara kelompok maupun individu. Oleh karena hal tersebut, penelitian harus dilakukan dalam pencegahan kecurangan didalam organisasi, terutama di pemda.

Kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) menurut badan pemeriksa keuangan (BPK) pada IHPS yang sudah dirangkum di semester I tahun 2023 mengungkapkan sejumlah 5.628 masalah SPI, mencakup 1.695 masalah mengenai kelemahan paada sistem pengendalian akauntansi serta pelaporan, 2.947 masalah dalam kelemahan sistem

pengendalian penyelenggaraan anggaran pendapatan serta belanja, dan 959 masalah kelemahan struktur pengendalian intern. Sebuah hal yang menjadi penyebab kelemahan sistem pengendalian internal paling sering disebabkan oleh lalainya pelaksana dan pejabat yang mempunyai tanggungjawab untuk menyajikan hasil dari pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan, penerapan tanggungjawab yang tidak mengikuti pada tugasnya ataupun kewajiban yang sudah ditentukan, kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, prosedur inventarisasi yang buruk, kurangnya sistem aplikasi yang digunakan, dan minimnya pengawasan dan pengendalian.

Berikut merupakan hasil data mengenai jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian internal kabupaten/kota yang berada pada Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 bisa terlihat dalam grafik 1.1



Sumber : LHP atas LKPD Tahun 2018-2022, 2024

Gambar 1.1 Grafik Kelemahan SPI Tahun 2018-2022

Didasari dari peristiwa yang ada pada beberapa temuan kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berkurang, bertambah atau naik serta turun. Hal tersebut menunjukkan jika sejumlah kasus yang mengenai hal tersebut secara umum berlangsung akibat dari kelalaian sejumlah pelaksana ataupun pejabat yang bertanggung jawab, mereka tidak mencermati hal-hal yang menjadi kelemahan didalam penyajian laporan keuangan, tidak optimumnya didalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawabnya, tidak seutuhnya paham akan ketetapan yang ada, tidak kuat melaksanakan pengendalian serta pengawasan aktivitas, koordinasi yang kurang terhadap setiap pihak yang bersangkutan, sistem aplikasi yang lemah, serta prosedur *stock opname* yang tidak sesuai standar. Tidak lakukukannya

pencatatan atau pencatatan yang kurang akurat, contohnya aset-aset yang tidak tercatat dalam neraca ataupun nilai aset dineraca tidak sama seperti catatan pendukung (<https://www.bpk.go.id>). Diantara faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh pada kelemahan pengendalian intern adalah ukuran pemda dan DAK atau alokasi dana khusus, PAD atau Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Modal. Dilakukannya penelitian ulang dalam meninjau kesuaian hasil penelitian berlandaskan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memakai objek penelitian lain yakni Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dengan memakai data penelitian pada rentang tahun 2018-2022.

Penelitian yang peneliti laksanakan pula dijalankan dalam untuk meninjau apakah ada pengaruh oleh faktor penentu total temuan kelemahan SPI pada pemda yang ada pada Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya harapan peneliti melalui terdapatnya pengaruh oleh faktor penentu total temuan pada kelemahan SPI pada pemda nantinya bisa menambahkan total temuan yang merupakan pertimbangan dalam melaksanakan SPI. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan ialah dalam mengetahui pengaruh secara bersama-sama serta parsial Ukuran Pemerintah Daerah, DAK, PAD, serta Belanja Modal pada Kelemahan SPI Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dijalankan ialah memakai metode penelitian kuantitatif. Dimana “Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berlandaskan terhadap ukuran kuantitas ataupun jumlah dimana bisa diterapkan dalam kejadian yang di observasi” (Fauzi *et al.*, 2019). Variabel independen yang dipakai terdiri atas 4 variabel yakni , ukuran pemerintah (X1), dana alokasi khusus (X2), pendapatan asli daerah (X3), serta belanja modal (X5). Sementara variabel dependen yang dipakai yaitu kelemahan sistem pengendalian internal (Y). pada penelitian yang dilaksanakan populasinya ialah seluruh kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pengambilan sampelnya teknik yang dipakai ialah teknik sampling jenuh ataupun yang dikenal dengan sensus sampling yang mana ketika seluruh anggota yang terdapat dalam populasi dipakai menjadi (Alawiyah, 2020).

Pada penelitian yang dijalankan menggunakan sampel yaitu 17 Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan dengan jangka waktu 5 tahun anggaran (2018-2022) sehingga total sampel yang diperoleh sebanyak 85 unit pengamatan. Penelitian yang

dilaksanakan memakai data sekunder dan bersumber pada data LKPD Kab/Kota yang ada pada provinsi Sumatera Selatan serta BPS. Laporan Keuangan Pemda diperoleh dari LHP BPK RI melalui website resmi BPK RI yaitu bpk.go.id. Dalam melakukan pencerminan secara umum terhadap variabel independen serta dependennya. Penulis memakai teknik analisis yakni teknik analisis deskriptif serta dalam melakukan uji hipotesisnya penulis memakai metode analisis regresi data panel. Untuk memudahkan kegiatan analisisnya, pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis yang akan peneliti ajukan pada data yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan memakai EViews 12.

Pada penelitian yang dijalankan peneliti memakai analisis regresi data panel, analisis ini adalah sebuah regresi yang memakai data panel. Analisis menggunakan metode ini adalah penggabungan data secara runtut waktu (*time-series*) bersama data *cross-section* (Ghozali, 2017). Untuk mengelola data panelnya menggunakan EViews 12, model penelitian yang paling sesuai harus dipilih. Uji Lagrange multiplier, uji Chow, dan uji Hausman ialah beberapa contoh pengujian yang dapat dilaksanakan dalam menetapkan model. Hasil uji ini menetapkan model paling baik. Model regresi yang nantinya dipakai pada penelitian yang dijalankan dipilih dua kali.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1.2 Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	7.435294	4.38E+12	2.20E+11	1.86E+11	4.39E+11
Median	7.000000	3.17E+12	2.31E+11	1.06E+11	3.82E+11
Maximum	14.00000	1.85E+13	4.82E+11	1.41E+12	1.12E+12
Minimum	2.000000	1.86E+12	6.07E+10	2.78E+10	9.26E+10
Std. Dev.	2.674603	3.48E+12	9.64E+10	2.52E+11	2.35E+11
Skewness	0.361333	2.705865	0.430467	3.335860	1.312612
Kurtosis	2.583292	9.968396	2.485891	13.84583	4.238424
Jarque-Bera Probability	2.464622 0.291618	275.7023 0.000000	3.561201 0.168537	574.2596 0.000000	29.84028 0.000000
Sum	632.0000	3.72E+14	1.87E+13	1.58E+13	3.73E+13
Sum Sq. Dev.	600.8941	1.02E+27	7.80E+23	5.34E+24	4.62E+24
Observations	85	85	85	85	85

Sumber: Output EViews 12, 2024

Ditinjau pada tabel 1.2 di atas, memperlihatkan pada Uji Statistik Deskriptifnya (Descriptive Statistics) menunjukkan hasil jika peneliti bisa menerangkan jika total semua sampel pada penelitian ialah semua Provinsi yang terletak pada Provinsi Sumatera Selatan dikalikan 5 tahun penelitian yang mempunyai totalan observasi senilai 85. Variabel ukuran pemerintah, dana alokasi khusus, PAD, belanja modal, serta kelemahan SPI pemerintah kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil Uji Pemilihan Model

Tabel 1.3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.546113	(16,64)	0.1113
Cross-section Chi-square	27.778256	16	0.0336

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Ditinjau pada tabel 4.7, berdasarkan hasil dari pengujian chow memperlihatkan jika *Cross-section f* bernilai yaitu senilai 27.778256 dan *P-Value* senilai $0,033 < 0,05$. Sebab demikian maka terima H1. berarti lebih baik model *Fixed Effect* daripada model *Common Effect*.

Tabel 1.4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.240455	4	0.5184

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Didasari pada tabel 1.4, pengujian hausman dari nilai *Cross-section Chi-square* yaitu bernilai 3.240455 dengan *P-Value*: $0,5184 > 0,05$, jadi terima H0 berarti lebih baik model *Random Effect* dibandingkan dengan model *Fixed Effect*.

Tabel 1.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

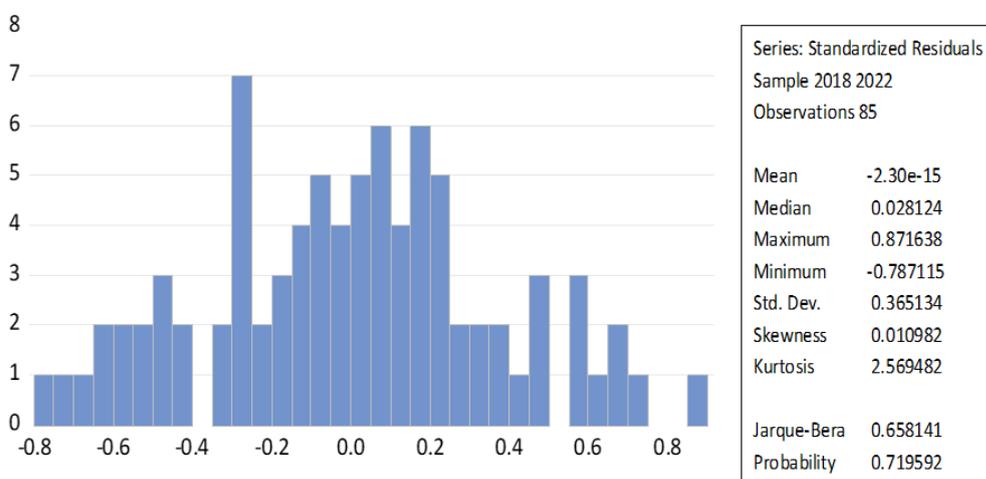
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.688301 (0.4067)	0.017029 (0.8962)	0.705330 (0.4010)
Honda	0.829639 (0.2034)	0.130495 (0.4481)	0.678918 (0.2486)
King-Wu	0.829639 (0.2034)	0.130495 (0.4481)	0.487744 (0.3129)
Standardized Honda	1.469488 (0.0709)	0.467943 (0.3199)	-2.510063 (0.9940)
Standardized King-Wu	1.469488 (0.0709)	0.467943 (0.3199)	-2.195006 (0.9859)
Gourieroux, et al.	--	--	0.705330 (0.3762)

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Ditinjau dari tabel 1.5, pengujian Lagrange Multiplier dari nilai *Cross-section* Breusch-Pagan menunjukkan hasil yaitu senilai $0,4067 > 0,05$, jadi H_1 diterima artinya lebih baik model *Random Effect* dibandingkan dengan model *Common Effect*.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 1.6 Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 1.6, maka dapat disebut jika data mempunyai distribus yang normal. Hal tersebut bisa terlihat pada P-Value $0,719592 > 0,05$, jadi terima H_0 yang mengartikan jika residual mempunyai distribusi yang normal.

Hasil Uji Auto Korelasi

Basuki & Prawoto (2017) menerangkan jika auto korelasi dapat berlangsung hanya dalam data *time series*. Meskipun terdapat data runut waktu, tetapi tidak menjadi *time series* yang murni. Sehingga pengujian auto korelasi tak dilakukan pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.7 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.231199	0.521931	4.274891	0.0001
X1	-2.24E-13	2.06E-13	-1.088267	0.2797
X2	-1.50E-12	2.36E-12	-0.636420	0.5263
X3	2.53E-12	2.49E-12	1.014684	0.3133
X4	1.40E-12	1.21E-12	1.156125	0.2511

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 1.7, maka dapat dikatakan jika pada model regresi yang ada pada penelitian tak mendapati masalah heteroskedastisitas. Hal tersebut bisa terlihat dari P-Value yang nilai seluruh variabelnya $> 0,05$. Oleh sebab itu model regresi tak mempunyai permasalahan pada heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 1.8 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.655519	0.768439	0.774804
X2	0.655519	1.000000	0.646933	0.599312
X3	0.768439	0.646933	1.000000	0.700607
X4	0.774804	0.599312	0.700607	1.000000

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Ditinjau pada tabel 1.8, pada penelitian yang dilaksanakan model regresi tidak mendapat masalah multikolinearitas. Hal tersebut bisa kita lihat pada *correlation* yang memiliki nilai seperti dibawah ini:

1. Nilai *correlation* diantara X1 dengan X2 senilai $0,65 < 0,90$ maka H0 diterima yang mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas.
2. Nilai *correlation* diantara X1 dengan X3 senilai $0,76 < 0,90$ maka H0 diterima yang mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas.
3. Nilai *correlation* diantara X1 dengan X4 senilai $0,77 < 0,90$ maka H0 diterima yang mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas
4. Nilai *correlation* diantara X2 dengan X3 senilai $0,64 < 0,90$ maka H0 diterima yang mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas.
5. Nilai *correlation* diantara X2 dengan X4 senilai $0,59 < 0,90$ maka H0 diterima mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas.
6. Nilai *correlation* diantara X3 dengan X4 senilai $0,70 < 0,90$ maka H0 diterima yang mengartikan jika tak ada permasalahan multikolinearitas.

Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 1.9 Hasil Uji Regresi Data Panel

R-squared	0.137226
Adjusted R-squared	0.144087
S.E. of regression	2.422465
F-statistic	3.181042
Prob(F-statistic)	0.007703

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Ditinjau pada tabel 1.9, jadi didapatkan model persamaan regresi data panelnya yakni seperti dibawah ini:

$$Y = 2.632 + 7.609X1 + 9.320X2 - 6.321X3 - 2.738X4 + e$$

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 1.10 Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.137226
Adjusted R-squared	0.144087
S.E. of regression	2.422465
F-statistic	3.181042
Prob(F-statistic)	0.007703

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Didasari dari tabel 1.10, output pengujian koefisien determinasi hasilnya menunjukkan nilai dari adjusted R-squared senilai 0,1440. Angka tersebut mengandung makna kolerasi antar variabel dependen dengan variabel independen ialah senilai 0,1440. Sehingga besarnya pengaruh yang diberikan oleh ukuran pemerintah, DAK, PAD, dan belanja modal adalah sebesar 14,40%. Sisanya sebesar 85,60% terpengaruh dari oleh faktor lainnya yang terdapat diluar penelitian yang dilakukan dan tidak diteliti.

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Tabel 1.11 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.632736	1.035952	6.402550	0.0000
X1	7.609547	3.54E-13	1.585031	0.0369
X2	9.320307	4.63E-12	2.015103	0.0473
X3	-6.321065	4.36E-12	-1.449336	0.1512
X4	-2.738025	2.12E-12	-2.702683	0.0084

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Didasari pada tabel 1.11 di atas, bisa dilaksanakan pengujian seperti dibawah ini:

1. Pengujian koefisien variabel Ukuran Pemerintah

Pada output Eviews didapat thitung senilai 1.58503. dalam menetapkan ttabel bisa ditetapkan dengan signifikansi 5% (0,05) dan derajat kebebasannya atau $df = n - k - 1$ ataupun dapat ditulis $85 - 4 - 1 = 80$ (n ialah total sampel serta k ialah total variabel independen). Hasilnya didapatkan pada ttabel yakni senilai 1,664. Karena thitung > ttabel ($1,585 < 1,664$)

Dilihat dari signifikansinya, apabila signifikansinya < 0,05 jadi terima H1 dan apabila signifikansinya > 0,05 jadi tolak H0. Karna signifikansi dalam pengujian $t < 0,05$ ($0,036 < 0,05$) jadi terima H2. Makad didapatkan nilai pada thitung senilai 1,585 dan nilai signifikan 0,036 jadi bisa kita ambil simpulan jika ukuran pemerintah secara parsial memiliki pengaruh secara positif serta signifikan pada Kelemahan SPI.

2. Pengujian koefisien variabel Dana Alokasi Khusus

Dari output Eviews dapat thitung senilai 2,015103. Dalam menetapkan ttabel bisa menggunakan signifikansi yaitu 5% (0,05) serta df nya = $n - k - 1$ ataupun bisa ditulis

$85-4-1 = 80$ (n ialah total sampel serta k ialah total variabel independen). Hasilnya didapat pada ttabel senilai 1,664 Karena thitung $>$ ttabel ($2,015 > 1,664$).

Berdasarkan signifikansi, apabila signifikansinya $< 0,05$ jadi terima H2 serta apabila signifikansinya $> 0,05$ jadi tolak H2. Karna signifikansi dalam pengujian $t < 0,05$ ($0,047 < 0,05$) jadi terima H2. Maka akan didapatkan nilai pada thitung senilai 2,015 pada nilai signifikan 0,047 jadi bisa kita tarik kesimpulan jika DAK secara parsial memiliki pengaruh secara positif serta signifikan pada Kelemahan SPI.

3. Pengujian koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan output Eviews dapat thitung senilai -1,449336. Dalam menetapkan ttabel bisa menggunakan signifikansi yaitu 5% (0,05) serta df nya = $n-k-1$ ataupun bisa ditulis $85-4-1 = 80$ (n ialah total sampel serta k ialah total variabel independen). Hasilnya didapat pada ttabel senilai 1,664 Karena thitung $>$ ttabel ($1,449 < 1,664$). Berdasarkan signifikansi, apabila signifikansinya $< 0,05$ jadi terima H3 serta apabila signifikansinya $> 0,05$ jadi tolak H3. Karna signifikansi dalam pengujian $t < 0,05$ ($0,151 > 0,05$) jadi tolak H3. Maka akan didapatkan nilai pada thitung senilai -1,449 pada nilai signifikan 0,151 jadi bisa kita tarik kesimpulan jika PAD secara parsial tidak memiliki pengaruh serta tidak signifikan pada Kelemahan SPI.

4. Pengujian koefisien variabel Belanja Modal

Dari output Eviews dapat thitung senilai -2,702683. Dalam menetapkan ttabel bisa menggunakan signifikansi yaitu 5% (0,05) dan derajat kebebasannya $df = n-k-1$ ataupun bisa ditulis $85-4-1 = 80$ (n ialah total sampel serta k ialah total variabel independen). Hasilnya didapat pada ttabel senilai 1,664 Karena thitung $>$ ttabel ($-2,702 > 1,664$).

Berdasarkan signifikansi, apabila signifikansinya $< 0,05$ jadi terima H4 serta apabila signifikansinya $> 0,05$ jadi tolak H4. Karna signifikansi dalam pengujian $t < 0,05$ ($0,008 < 0,05$) jadi terima H4. Maka akan didapatkan nilai pada thitung senilai -2,702 pada nilai signifikan 0,047 jadi bisa kita tarik kesimpulan jika belanja modal secara parsial memiliki pengaruh secara negatif serta signifikan pada Kelemahan SPI.

Hasil Uji Signifikan Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji f)**Tabel 1.12 Hasil Uji F**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.632736	1.035952	6.402550	0.0000
X1	7.609547	3.54E-13	1.585031	0.0369
X2	9.320307	4.63E-12	2.015103	0.0473
X3	-6.321065	4.36E-12	-1.449336	0.1512
X4	-2.738025	2.12E-12	-2.702683	0.0084

Sumber: Output Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 4.17, diketahui F_{hitung} sebesar 3.181042. Untuk F_{tabel} tingkatan signifikannya yakni 0,05 dan derajat kebebasan 1 (total variabel-1) = 3 serta derajat kebebasan 2 (n-k-1) ataupun dapat ditulis $85-4-1 = 80$ (n merupakan total sampel serta k merupakan total variabel independen). Hasilnya didapatkan pada F_{tabel} senilai 2,490. $F_{hitung} > F_{tabel}$ (3.181 > 2,490).

Berdasarkan signifikansi, apabila signifikansinya < 0,05 jadi terima H_a serta apabila signifikansinya > 0,05 jadi tolak H_a . Karna signifikansi dalam pengujian $f < 0,05$ (0,007 < 0,05) jadi terima H_a . Maka akan didapatkan nilai pada t_{hitung} senilai 2,490 pada nilai signifikan 0,000 jadi bisa kita tarik kesimpulan jika ukuran pemerintah, DAK, PAD serta belanja modal dengan simultan memiliki pengaruh dan signifikan pada Kelemahan SPI.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian yang dilaksanakan ialah secara parsial Ukuran Pemerintah dan Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh secara signifikan positif pada kelemahan SPI Pemerintah yang mengartikan melalui terdapatnya peningkatan ukuran pemerintah (total aset) serta dana alokasi khusus akan membuat jumlah temuan kasus kelemahan SPI Pemerintah Kabupaten/Kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2022 pun ikut mendapati peningkatan.

Secara parsial Belanja Modal memberikan pengaruh negatif signifikan pada kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang mengartikan melalui adanya peningkatan Belanja Modal, dapat membuat jumlah temuan kasus kelemahan SPI Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018- 2022 dapat mengalami penurunan.

Secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dengan signifikan pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Hal tersebut karena jumlah Pendapatan Asli Daerah tiap-tiap pemerintah yang tidak sama hingga membuat, sulit untuk menentukan kategori besar kecilnya PAD suatu daerah maka pengaruh PAD terhadap jumlah temuan sistem pengendalian internal tidak tergambar dengan jelas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti berharap pemerintah yang berada pada Kabupaten/Kota dan ada pada Provinsi Sumatera Selatan bisa terus membuat peningkatan pada kualitas pengendalian internnya supaya dapat meminimalisir temuan kelemahan SPI, dengan cara pemisahan tugas dan review kinerja.

Peneliti setelah ini diharap agar menambah cangkupan total sampel lewat perluasan wilayah penelitian serta pada tahun anggaran yang diamati agar lebih panjang lagi, hingga hasilnya yang didapat bisa menjelaskan dengan lebih cerminan keadaan yang tergeneralisasi.

Peneliti setelah ini diharap dapat menambah variabel independen lainnya menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kelemahan SPI pemerintah daerah, contohnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kualitas Sumberdaya Manusia (SDA) serta jumlah pendapatan yang didapat yang asalnya oleh pemerintah pusat (DAU).

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, T. T., Sumardjo, M., & Darmastuti, D. (2020). Analisis Determinan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 415–424.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.397>
- Andesti, M., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Kompleksitas Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 131–149.
<https://doi.org/10.24036/jea.v4il.468>.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2018.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2022.
- Fauzi. (2019). *Metode Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi* (S. Y. (ed.)). Salemba Empat. (ed.).
- Ghozali, I. dan R., & Dwi. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iqbal, M. (2017). Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Riau dan Sumatera Barat. *JOM Fekon*, 4(1), 881–895.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Majid, A., RrTitiek Herwanti, H., & Fitriah, N. (2017). INTERN (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *JMM UNRAM*.
- Murdayanti, yunika. (2016). Factors Affecting the Internal Control Weaknesses of Local Governments. *Advanced Science Letters*, 22, 56.
- Mustikasari, & Ardiani, F. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 316–326.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
- Republik Indonesia. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Saferi, M., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2234–2249.
<https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.209>.
- Samhah, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran dan Kompleksitas terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. In *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (pp. 22,1–19).
- Simanjuntak, D. N. I. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Alfabeta Bandung* (S. (ed.)). Alfabeta Bandung (ed.).
- Tyaswarman, R. (2022). *Faktor-Faktor yang memengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern (pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020)*.
<https://doi.org/2020>.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39836/18312269.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ulfa, F. septiana. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Provinsi Di Sumatera Tahun 2017-2021 Frisca Septiana Ulfa Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2), 2017–2021. <https://www.bpk.go.id/ihps>

Vulandari, Retno Tri, Rimawati dan Lisyati. 2021. “*Statistika Dengan Aplikasi Eviews Referensi Olah Data Penelitian*”. Edisi 1. Yogyakarta: Gava

Weren. (2004). *Accounting*. 21 th edition. Penerbit Salemba Empat

Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2003130>